

ANGGARAN – PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA

QANUN KOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2010

2010

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2010

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 3 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota untuk memperoleh persetujuan bersama sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh 903 - 15 Tahun 2010 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa Tahun 2010 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Pe Walikota Langsa Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2010;

DASAR HUKUM:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 No Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih da dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Ta Lembaran Negara Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tah Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Un (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggu Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 4400) ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negar 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah b kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ked Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerinta dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Le Negara Nomor 4438) ;Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Le Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Dae Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Nomor 4028); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Republik Indoensia

Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Ke Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Le Negara Nomor 4416) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Pe Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Le Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 45 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Le Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4570); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Negara (Lembaran Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Le Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Pe Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Le Negara Nomor 4585); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Peng Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 165, Tambahan Lembaga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Ke Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tah tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang P Pengelolaan Keuangan Daerah ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Hukum Daerah;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah da Daerah;Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pem Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 4693); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan A Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan A Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Bara Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahu tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;

Qanun ini Mengatur tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2010

- STATUS:
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 25 Maret 2010.